PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja | Hari: Jumat | Tanggal: 27 Maret 2026 | Halaman: 3

Jangan Korbankan Pelayanan Publik

Pemkot Yogya Mulai Uji Coba WFH Satu Hari Sepekan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal menggulirkan uji coba *Work From Home* (WFH) satu hari dalam sepekan mulai Jumat (27/3). Rencana penerapan WFH ini merupakan bagian dari upaya menjalankan arahan pemerintah pusat, terutama dalam rangka efisiensi kerja dan anggaran.

Namun, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengingatkan supaya WFH tidak dijadikan alasan untuk bersantai atau meninggalkan kewajiban tanpa alasan yang jelas. Ia pun sudah menyiapkan indikator untuk memantau aktivitas para pegawai Pemkot selama WFH, khususnya terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan operasional dan pribadi.

"Sehingga, kalau diterapkan WFH, jangan bolos-bolos. Nanti saya cek, kalau (konsumsi) bensinnya enggak turun dalam satu bulan, ya saya laporkan. Kalau BBM tetap sama saja (padahal WFH), ini jadi indikator penting yang kita ikuti bersama," tegasnya, Kamis (26/3).

Menurutnya, penghematan konsumsi bahan bakar minyak harus menjadi dampak nyata dari kebijakan WFH ini, sebagai bentuk efisiensi uang rakyat. Dalam penyusunan skema WFH, Wali Kota mengaku telah berkoordinasi dengan jajaran Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemkot juga terus menjalin komunikasi dengan DPRD Kota Yogyakarta dan Forkopimda agar kebijakan ini berjalan selaras dengan target efisiensi di masa depan. "Semangat kita adalah berhati-hati dan menyempurnakan kerja dalam mendapatkan imbalan dari pemerintah, yang mana itu merupakan bagian dari uang rakyat," ujarnya.

Jangan serampangan

Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan *Work From Home* satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi BBM memicu reaksi dari publik. Salah satunya dari Jogja Corruption Watch (JCW), yang memberikan peringatan keras agar kebijakan yang lahir sebagai dampak ketegangan di Timur Tengah tersebut tidak diputuskan secara serampangan.

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba, menyatakan, pemerintah perlu melakukan kalkulasi matang, agar niatan efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik. "Perlu pertimbangan matang dan tidak boleh gegabah. Terutama soal pilihan hari dan daerah mana saja yang akan menerapkan kebijakan tersebut," ujarnya, Kamis (26/3).

> *Perlu pertimbangan matang dan tidak boleh gegabah. Terutama soal pilihan hari dan daerah mana saja yang akan menerapkan kebijakan tersebut.*

Kamba pun menyoroti, jika nantinya hari Jumat dipilih sebagai hari WFH, diprediksi bakal menjadi bumerang bagi daerah seperti Kota Yogyakarta. Bukan tanpa alasan, WFH pada hari Jumat akan memicu lonjakan mobilitas, di mana Yogyakarta sebagai kota wisata dipastikan bakal diserbu warga luar daerah yang ingin memanfaatkan momen long weekend.

"Kalau pilihannya hari Jumat, potensi kemacetan di ruas jalan Kota Yogyakarta justru meningkat. Mobilitas warga tinggi karena berdekatan dengan akhir pekan. Bukan hanya warga lokal, tapi juga wisatawan luar DIY," jelasnya.

"Hasilnya, mobilitas warga malah melonjak dan meningkatkan penggunaan BBM. Sehingga tujuan awal dari WFH dalam sepekan untuk menghemat BBM justru tidak tercapai," tambah Kamba.

Yang tak kalah penting, JCW pun menuntut perhatian pemerintah, mengingat memperlambat waktu pelayanan publik merupakan bentuk perilaku korupsi yang nyata.

Ia mencontohkan, urusan administrasi seperti pembuatan KTP atau Kartu Keluarga (KK) tidak boleh terhambat hanya karena para pegawai bekerja dari rumah.

"Jangan sampai yang seharusnya selesai hari Jumat, baru bisa diambil Senin karena alasan WFH. Mengurangi atau memperlambat waktu pelayanan itu adalah perilaku korupsi. Ini yang harus dijaga," tegasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005